

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas sebuah institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin (Unhas). Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap tata kelola yang baik (*good governance*), khususnya di sektor pendidikan, perguruan tinggi dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek manajemennya, terutama dalam pengelolaan keuangan (Jones & Pendlebury, 2023). Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima, baik dari pemerintah, donatur, maupun mahasiswa, digunakan secara tepat, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut (Martini *et al.*, 2022).

Di Universitas Hasanuddin, upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah mendapatkan perhatian serius, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran yang semakin kompleks. Sebagai salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia, Unhas mengelola anggaran dalam jumlah yang signifikan, termasuk dana pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dana dari berbagai kerjasama riset dan program internasional. Namun, besarnya anggaran ini tidak terlepas dari tantangan dalam hal pengelolaan yang efisien dan akuntabel, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan harus

dipertanggungjawabkan dengan baik dan tepat sasaran (Puspitasari & Nugroho, 2021).

Peraturan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas, telah menetapkan pedoman bagi perguruan tinggi negeri dalam hal pengelolaan keuangan yang akuntabel. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sistem monitoring yang efektif dan rendahnya literasi keuangan di beberapa unit kerja (Setiawan, 2023). Oleh karena itu, penting bagi Universitas Hasanuddin untuk terus memperbaiki mekanisme pelaporan keuangan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam Pasal 65 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis pengelolaan dana di perguruan tinggi negeri, yaitu: 1) PTN-Satker (Satuan Kerja Kementerian), 2) PTN-BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum), dan 3) PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). PTN-BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dan memiliki status sebagai badan hukum publik yang otonom.

Otonomi yang diberikan dalam undang-undang ini mencakup dua bidang, yakni akademik dan non-akademik. Pada bidang akademik, otonomi meliputi kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sedangkan dalam bidang non-akademik, otonomi mencakup pengaturan norma, keuangan, kemahasiswaan, sumber daya manusia,

kebijakan operasional, serta sarana dan prasarana. Pemberlakuan undang-undang ini menjadi landasan bagi perguruan tinggi untuk berkompetisi dalam menghadapi tantangan global. Organisasi dipacu untuk mendapatkan legitimasi melalui perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Dalam upaya untuk bertahan, organisasi harus beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan cara yang diterima oleh para pemangku kepentingan (Dillard, Rigsby, dan Goodman, 2004).

Namun, masalah muncul karena undang-undang tersebut tidak memberikan panduan spesifik mengenai tata kelola keuangan, khususnya untuk PTN-BH. Hingga kini, standar yang mengatur pengelolaan keuangan, termasuk penyusunan laporan arus kas, pencatatan, serta laporan keuangan akhir tahun anggaran, belum ditetapkan. Untuk menanggapi hal tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Peraturan ini menjelaskan tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTN-BH.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan PTN-BH harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Berdasarkan aturan ini, PTN-BH memiliki kewenangan untuk menentukan pedoman dalam pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan PTN-BH harus mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan

adanya peraturan tersebut, perencanaan anggaran perguruan tinggi di era otonomi harus dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja.

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem yang berfokus pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan biaya yang telah ditetapkan. Pendekatan ini diadopsi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam anggaran tradisional, khususnya terkait dengan kurangnya alat ukur untuk menilai kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran berbasis kinerja menekankan konsep *value for money*, yaitu mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Pendekatan ini juga menitikberatkan pada penentuan prioritas tujuan secara sistematis dan rasional dalam pengambilan keputusan, menjadikan anggaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan Unhas adalah penerapan sistem informasi keuangan berbasis teknologi, yang diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan (Widyasari & Pramono, 2022). Dengan adanya sistem ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dapat mengakses informasi yang diperlukan secara cepat dan tepat, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan akuntabel.

Melalui perbaikan terus-menerus dalam pengelolaan keuangan, Universitas Hasanuddin dapat terus memperkuat posisinya sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia yang mampu menjawab

tantangan global, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi (Zulkifli & Haris, 2023).

Akuntabilitas juga menjadi krusial dalam konteks efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung program akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi terhadap output pendidikan tinggi, Universitas Hasanuddin harus memastikan bahwa penggunaan anggaran selaras dengan visi dan misi institusi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas serta penelitian yang inovatif (Handayani & Mulyana, 2023). Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak hanya berperan dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai target institusi.

Selain itu, dinamika kebijakan pemerintah yang terus berubah, seperti otonomi kampus dan pergeseran dari mekanisme anggaran berbasis input ke anggaran berbasis kinerja, juga memberikan tantangan tersendiri bagi Unhas. Dalam kerangka ini, Unhas harus mampu mengelola anggarannya berdasarkan capaian kinerja yang terukur, sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan output yang dihasilkan (Hidayat & Soerjono, 2023). Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang ketat dan transparan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dibiayai memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dengan adanya tekanan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing global, Unhas harus mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola keuangan yang sesuai dengan standar internasional. Ini meliputi penerapan prinsip-prinsip seperti integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam seluruh proses penganggaran dan pelaporan keuangan (Santoso, 2022). Melalui langkah-langkah ini, Unhas dapat membuktikan komitmennya untuk berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Universitas Hasanuddin juga telah memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga akuntansi dan keuangan untuk membangun kapasitas internal terkait manajemen keuangan yang akuntabel. Program pelatihan dan sertifikasi untuk staf keuangan serta peningkatan kualitas audit internal merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memastikan standar akuntabilitas yang tinggi dalam setiap level organisasi (Rahardjo, 2023). Selain itu, audit eksternal yang independen secara rutin juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol tambahan untuk memastikan bahwa setiap laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

Komitmen ini juga tercermin dalam upaya Universitas Hasanuddin untuk terus memperkuat tata kelola melalui pengembangan regulasi internal yang mendukung peningkatan akuntabilitas keuangan. Kebijakan ini meliputi prosedur yang jelas untuk pelaporan, pengawasan anggaran, hingga pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan

anggaran (Suryawan & Bakri, 2022). Hal ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan program-program yang ada, tetapi juga memberikan kejelasan dan kepercayaan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Dengan demikian, Universitas Hasanuddin terus berupaya memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, sejalan dengan tuntutan era digital dan transparansi publik yang semakin tinggi. Langkah ini penting dalam menjaga reputasi Unhas sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, serta memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di masa yang akan datang (Putra & Arifin, 2023).

Meskipun Universitas Hasanuddin telah berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, berbagai tantangan dan problematika masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah masalah teknis terkait implementasi sistem informasi keuangan juga sering kali menjadi kendala. Sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, disertai dengan kurangnya pelatihan bagi staf dalam penggunaan teknologi keuangan, sering kali menyebabkan kesalahan dalam input data serta keterlambatan dalam pelaporan keuangan, selain itu pergantian kepemimpinan juga mempengaruhi karena setiap pemimpin memiliki terobosan baru dalam mengembangkan system informasi terutama aplikasi keuangan sehingga para pegawai harus beradaptasi dengan aplikasi

baru (Widyastuti, 2022). Hal ini mengakibatkan kurangnya akurasi dan keandalan informasi yang disajikan, sehingga menghambat pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berbasis data.

Kendala lainnya adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia di beberapa unit pengelola keuangan. Meskipun Universitas Hasanuddin telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi staf keuangan melalui pelatihan dan sertifikasi, perbedaan tingkat kompetensi antarunit masih menjadi masalah yang nyata (Santoso & Kurniawan, 2021). Hal ini berakibat pada ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan yang tidak konsisten di seluruh universitas.

Dari sisi regulasi, meskipun sudah ada berbagai aturan yang mengatur tata kelola keuangan di institusi pendidikan tinggi, ketidakjelasan interpretasi regulasi tersebut juga menjadi masalah yang sering muncul. Beberapa unit mengalami kesulitan dalam menafsirkan peraturan pemerintah dan pedoman pengelolaan keuangan, sehingga menyebabkan perbedaan dalam penerapan kebijakan akuntansi dan keuangan (Pratama, 2022). Hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.

Masalah lainnya adalah kurangnya pengawasan yang efektif. Sistem audit internal di beberapa universitas, termasuk di Universitas Hasanuddin, masih memerlukan peningkatan dalam hal pengawasan yang mendalam dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan

dampak yang diharapkan (Wijayanto, 2023). Minimnya pengawasan yang memadai dapat membuka celah bagi penyalahgunaan anggaran dan menurunkan tingkat akuntabilitas.

Terakhir, birokrasi yang rumit dalam proses penganggaran juga dapat menjadi hambatan. Proses persetujuan dan realisasi anggaran yang membutuhkan banyak tahapan birokrasi sering kali menyebabkan keterlambatan dalam implementasi program atau kegiatan. Ini pada akhirnya dapat menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan dan menurunkan efisiensi penggunaan anggaran (Nugroho, 2022).

Problem-problem tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya signifikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin, masih ada berbagai tantangan yang perlu diselesaikan secara sistematis. Penyelesaian masalah ini akan sangat menentukan keberhasilan Unhas dalam mencapai tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel di masa depan.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin sangat penting, mengingat peran sentral perguruan tinggi sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi dalam bidang pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Seiring dengan meningkatnya tuntutan global terhadap institusi pendidikan tinggi untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel, Universitas Hasanuddin harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar

memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga masyarakat luas (Jones & Pendlebury, 2023).

Urgensi penelitian ini juga terletak pada pentingnya memastikan bahwa alokasi dana pendidikan dan riset yang diterima Universitas Hasanuddin, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, dikelola secara optimal dan akuntabel. Dengan semakin meningkatnya volume anggaran dan semakin kompleksnya sumber pendanaan, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien untuk menjamin bahwa sumber daya keuangan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan (Martini *et al.*, 2022). Penelitian ini juga relevan dalam menghadapi tantangan dinamika kebijakan nasional dan internasional, di mana penerapan standar keuangan yang ketat sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas institusi (Hidayat & Soerjono, 2023).

Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi penting di era digitalisasi dan integrasi sistem keuangan. Kemajuan teknologi telah memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Namun, tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal, risiko terjadinya inefisiensi dan ketidakakuratan pelaporan keuangan tetap ada (Widyastuti, 2022). Penelitian ini mendesak untuk membantu menemukan solusi guna memperbaiki masalah teknis dan prosedural yang menghambat optimalisasi sistem informasi keuangan yang telah diterapkan di Universitas Hasanuddin.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting tidak hanya bagi Universitas Hasanuddin, tetapi juga bagi seluruh sektor pendidikan tinggi di Indonesia yang ingin memastikan bahwa mereka mampu mengelola keuangan dengan akuntabilitas yang tinggi dan memberikan manfaat maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Bertolak dari kondisi objektif diatas peneliti tertarik menulis tentang **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pada Universitas Hasanuddin)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan dijelaskan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepatuhan terhadap Regulasi dalam pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin?
2. Bagaimana Pengawasan Internal dan Eksternal dalam pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin?
3. Bagaimana Efisiensi Penggunaan Anggaran, dan Pelaporan Keuangan yang Akurat dalam pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah anatar lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kepatuhan terhadap Regulasi dalam pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin.
2. Untuk menganalisis Pengawasan Internal dan Eksternal dalam pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin.

3. Untuk menganalisis Efisiensi Penggunaan Anggaran, dan Pelaporan Keuangan yang Akurat dalam pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Sistem Keuangan daerah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran agar dapat memperbaiki sistem Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Universitas Hasanuddin.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan informasi untuk kajian topik-topik dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta dapat dipakai sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam konteks modern semakin menjadi pusat perhatian seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan tanggung jawab di berbagai sektor. Menurut Christensen dan Lægreid (2021), akuntabilitas bukan hanya persoalan administratif tetapi juga melibatkan aspek normatif, di mana tanggung jawab moral, legal, dan politik harus dikelola secara efektif untuk menjaga kepercayaan publik. Di sektor publik, akuntabilitas yang lemah sering kali terkait dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintah (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Selain itu, O'Neill (2018) menegaskan bahwa akuntabilitas harus diintegrasikan dengan kemampuan organisasi untuk memberikan hasil yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, akuntabilitas tidak hanya mencakup pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan yang telah diambil, tetapi juga terkait erat dengan kinerja organisasi itu sendiri. Misalnya, dalam konteks organisasi keuangan, akuntabilitas memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan keuangan yang diambil sesuai dengan tujuan keuangan yang telah ditetapkan serta memperhatikan risiko keuangan yang dapat muncul (Bracci & Llewellyn, 2015).

Aspek penting lainnya dari akuntabilitas adalah peran budaya organisasi. Menurut Pina, Torres, dan Yetano (2019), budaya akuntabilitas yang kuat di dalam organisasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa terdorong untuk bertindak secara etis dan transparan. Hal ini sejalan dengan pandangan Bovens (2010), yang menggarisbawahi bahwa akuntabilitas memerlukan komitmen dari seluruh tingkatan organisasi untuk membangun mekanisme pelaporan yang kuat, baik secara internal maupun eksternal.

Akuntabilitas dalam sektor publik sering kali diukur melalui kinerja manajemen publik dan pengelolaan keuangan yang tepat. Menurut Pierre dan Peters (2020), dalam konteks pemerintahan modern, akuntabilitas publik tidak hanya berkaitan dengan akuntabilitas administratif tetapi juga dengan akuntabilitas politik dan sosial. Hal ini mencakup bagaimana pemerintah mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan transparansi dan dengan pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Keberhasilan akuntabilitas diukur melalui kepercayaan publik dan bagaimana organisasi publik menavigasi kompleksitas birokrasi dan keterbukaan informasi.

Lerner dan Tetlock (2017) menyoroti pentingnya akuntabilitas di tingkat individu dalam konteks organisasi. Akuntabilitas individu mendorong pemimpin dan manajer untuk tidak hanya mematuhi aturan formal tetapi juga untuk mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap reputasi pribadi dan organisasi. Teori ini dikenal sebagai

accountability pressure, di mana individu di bawah tekanan akuntabilitas lebih cenderung membuat keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Hal ini relevan dalam konteks manajemen keuangan, di mana tekanan untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas operasional dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dapat berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam sektor swasta, akuntabilitas juga terkait dengan corporate governance atau tata kelola perusahaan. Menurut Tricker (2019), tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab kepada dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini diperkuat dengan adanya regulasi internasional seperti Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat yang mengharuskan perusahaan untuk menerapkan standar akuntabilitas yang tinggi dalam pelaporan keuangan mereka (Donaldson, 2018).

Akuntabilitas juga telah berkembang dalam konteks globalisasi. Globalisasi memaksa perusahaan dan organisasi untuk beroperasi di bawah standar akuntabilitas yang berbeda di berbagai negara. Menurut Held dan McGrew (2020), akuntabilitas dalam konteks global melibatkan tanggung jawab lintas negara, di mana perusahaan multinasional harus mematuhi berbagai standar regulasi, etika, dan lingkungan di negara-negara tempat mereka beroperasi.

Dalam keseluruhan pandangan, akuntabilitas tidak hanya dilihat sebagai alat kontrol atau pelaporan, tetapi juga sebagai prinsip etika dan sosial yang membantu membangun kepercayaan dan integritas di dalam organisasi. Peningkatan akuntabilitas melalui mekanisme formal seperti audit, pelaporan keuangan, dan transparansi publik sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas organisasi dan menjaga keberlanjutan jangka panjang.

2.1.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya menjadi isu dalam organisasi bisnis, tetapi juga menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Menurut Bovens (2021), akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien, serta tunduk pada pengawasan publik. Akuntabilitas ini memastikan bahwa pemerintah dan instansi terkait bertanggung jawab atas perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan organisasi, akuntabilitas sering dikaitkan dengan konsep tata kelola yang baik (*good governance*). Menurut Lenz dan Hahn (2017), tata kelola yang baik tidak hanya mencakup pembuatan kebijakan dan prosedur yang tepat, tetapi juga memastikan adanya pengendalian internal yang efektif, transparansi, dan pelaporan yang akurat. Mereka juga menekankan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan mencakup komitmen untuk mematuhi standar etika dan regulasi keuangan yang berlaku di sektor masing-masing.

Pengendalian internal yang kuat merupakan elemen penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) mengidentifikasi bahwa pengendalian internal yang baik membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara yang lebih akuntabel, serta meminimalkan risiko penyimpangan keuangan. Pengendalian internal ini mencakup evaluasi risiko, pengawasan aktivitas operasional, serta audit dan penilaian berkelanjutan terhadap keuangan organisasi (COSO, 2017).

Pelaporan keuangan juga memainkan peran penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurut Deegan (2021), laporan keuangan yang transparan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan organisasi dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi bagaimana dana digunakan. Pelaporan keuangan yang akurat dan jujur sangat penting untuk menciptakan kepercayaan antara organisasi dan pemangku kepentingan, termasuk investor, pemegang saham, dan masyarakat umum.

Dalam lingkungan sektor publik, tuntutan untuk meningkatkan transparansi telah menghasilkan perkembangan regulasi yang lebih ketat mengenai pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Pollitt dan Bouckaert (2017) yang menyatakan bahwa reformasi administrasi publik telah memperkuat kewajiban pemerintah untuk memberikan laporan

keuangan yang lebih transparan, akurat, dan tepat waktu. Mereka juga menyoroti bahwa peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan publik bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Penerapan teknologi digital juga berdampak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Teknologi digital memfasilitasi pelaporan keuangan yang lebih efisien dan memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Heald & Hood, 2018). Sistem keuangan berbasis teknologi memungkinkan pelacakan yang lebih baik atas penggunaan anggaran dan menyediakan alat yang lebih efektif untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Namun, penerapan teknologi juga membawa tantangan baru, seperti kebutuhan akan perlindungan data dan privasi yang lebih ketat untuk menghindari risiko kebocoran informasi keuangan yang sensitif (Meijer, 2017).

Selain itu, faktor eksternal seperti regulasi internasional juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat global. Menurut Schillemans dan Busuioc (2020), perusahaan multinasional harus mematuhi berbagai aturan akuntabilitas keuangan yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Hal ini mencakup pemenuhan standar pelaporan internasional seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang keuangan setempat.

Sementara itu, akuntabilitas keuangan juga dipengaruhi oleh kultur organisasi. Organisasi yang mendorong etika kerja yang kuat cenderung lebih berhasil dalam mempertahankan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan. Penelitian oleh Roberts (2020) menemukan bahwa perusahaan yang menempatkan akuntabilitas sebagai nilai inti dari budaya organisasi mereka cenderung memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan responsif terhadap audit dan pengawasan.

Secara keseluruhan, akuntabilitas pengelolaan keuangan melibatkan serangkaian proses yang komprehensif mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan dan audit. Proses-proses ini memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang bertanggung jawab, dan dapat memberikan manfaat maksimal kepada para pemangku kepentingan, baik di sektor publik maupun swasta. Dengan semakin kompleksnya lingkungan keuangan global, peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan tetap menjadi fokus utama dalam tata kelola organisasi di masa depan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah landasan dari tata kelola yang baik dalam organisasi, terutama dalam sektor publik dan swasta. Menurut Gray, Owen, & Adams (1996), akuntabilitas dalam konteks ini mengacu pada kewajiban organisasi untuk menjelaskan penggunaan sumber daya keuangan secara transparan, memenuhi standar regulasi, menjalankan pengawasan yang efektif, menggunakan anggaran secara efisien, serta menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Setiap elemen ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa organisasi

mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada pemangku kepentingan dengan cara yang terbuka dan bertanggung jawab.

1. Transparansi

Transparansi adalah aspek yang sangat penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan. Gray, Owen, & Adams (1996) menekankan bahwa transparansi bukan hanya soal keterbukaan dalam menyajikan informasi, tetapi juga tentang menyediakan data yang komprehensif, jelas, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Transparansi menciptakan ruang bagi pemangku kepentingan untuk memantau dan mengevaluasi keputusan-keputusan keuangan yang diambil oleh organisasi, serta memberikan mereka hak untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan yang memadai.

Menurut OECD (1999), transparansi meningkatkan kualitas tata kelola dengan memperbaiki aliran informasi antara organisasi dan pemangku kepentingan. Hal ini juga berperan penting dalam mencegah korupsi, karena dengan adanya keterbukaan dalam pelaporan, potensi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan dapat lebih mudah diidentifikasi. COSO (2013) menambahkan bahwa transparansi dalam laporan keuangan juga memungkinkan organisasi untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat reputasi mereka di pasar. Ketika pemangku kepentingan, seperti investor dan pemerintah, dapat mengakses informasi yang jujur dan relevan, mereka lebih cenderung

mendukung keputusan organisasi karena yakin bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

2. Kepatuhan terhadap Regulasi

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi dari akuntabilitas keuangan yang baik. Menurut Gray, Owen, & Adams (1996), kepatuhan ini memastikan bahwa organisasi beroperasi dalam batas-batas hukum dan etika yang berlaku. Hal ini meliputi penerapan standar akuntansi yang diakui secara internasional, seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS), serta mengikuti peraturan pajak, hukum perusahaan, dan pedoman tata kelola lainnya. Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya menjaga integritas organisasi di mata hukum, tetapi juga melindungi pemangku kepentingan dari potensi risiko finansial yang disebabkan oleh tindakan ilegal atau tidak etis.

COSO (2013) menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah bagian integral dari sistem pengendalian internal yang baik. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan. Lebih jauh lagi, OECD (1999) menekankan pentingnya regulasi yang kuat di sektor publik untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan mandat pemerintah dan memenuhi standar etika yang tinggi. Dengan kepatuhan yang kuat, organisasi dapat menghindari denda atau sanksi hukum yang dapat merusak reputasi dan operasional mereka.

3. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan adalah elemen penting lain dari akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pengawasan internal berfungsi sebagai garis pertama dalam sistem pengendalian organisasi, memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan benar dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Gray, Owen, & Adams (1996) menyebutkan bahwa pengawasan internal membantu organisasi dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian, serta memberikan umpan balik berkelanjutan tentang efektivitas kebijakan keuangan.

Audit internal ini berperan penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan, serta dalam menjaga akuntabilitas secara keseluruhan (COSO, 2013). Pengawasan eksternal, di sisi lain, melibatkan auditor independen yang bertugas untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan organisasi disusun sesuai dengan standar akuntansi dan hukum yang berlaku. Menurut OECD (1999), pengawasan eksternal adalah komponen krusial dari tata kelola yang baik di sektor publik, karena memberikan jaminan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bahwa dana publik digunakan dengan cara yang benar dan efisien.

Pengawasan eksternal juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan laporan independen tentang kondisi keuangan organisasi. Ketika audit dilakukan oleh pihak eksternal yang independen, hasilnya lebih dipercaya oleh publik, karena

dianggap lebih objektif dan tidak bias (Gray *et al.*, 1996). Ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kepercayaan antara organisasi dan pemangku kepentingan.

4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi dalam penggunaan anggaran adalah salah satu indikator kunci dari akuntabilitas pengelolaan keuangan. Gray, Owen, & Adams (1996) menggarisbawahi bahwa organisasi yang akuntabel harus memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efisiensi ini melibatkan perencanaan yang cermat, pengelolaan risiko, dan penerapan strategi keuangan yang meminimalkan pemborosan. Efisiensi penggunaan anggaran juga terkait erat dengan tanggung jawab organisasi dalam mencapai hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dengan biaya yang seminimal mungkin.

OECD (1999) menambahkan bahwa dalam sektor publik, efisiensi anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola negara digunakan untuk mencapai manfaat sosial yang paling besar. Efisiensi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena lebih banyak layanan dan program yang dapat didanai tanpa meningkatkan beban anggaran. Efisiensi juga mencerminkan manajemen yang baik, karena menunjukkan kemampuan organisasi dalam memaksimalkan output dengan input yang minimal.

Dalam sektor swasta, COSO (2013) menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang baik juga dapat berkontribusi pada keunggulan kompetitif, karena perusahaan yang mampu mengelola keuangan dengan efisien lebih cenderung untuk bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif.

5. Pelaporan Keuangan yang Akurat

Pelaporan keuangan yang akurat adalah dasar dari semua upaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Gray, Owen, & Adams (1996) menegaskan bahwa laporan keuangan yang akurat dan komprehensif harus mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya dari sebuah organisasi. Laporan tersebut harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti IFRS, dan harus memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana dikelola dan dialokasikan.

Pelaporan keuangan yang akurat adalah hasil dari sistem pengendalian internal yang kuat dan pengawasan yang efektif. COSO (2013) menjelaskan bahwa pelaporan yang tepat waktu dan akurat memungkinkan manajemen dan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Akurasi dalam pelaporan juga meningkatkan kepercayaan antara organisasi dan pihak eksternal, seperti investor, pemerintah, dan masyarakat luas, karena mereka dapat mengandalkan informasi tersebut untuk menilai kinerja keuangan organisasi.

OECD (1999) menyatakan bahwa di sektor publik, akurasi laporan keuangan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Ketika laporan keuangan disusun secara akurat, masyarakat dapat memantau bagaimana dana publik digunakan dan menilai apakah pemerintah telah memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas.

2.1.3. Pentingnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah prinsip dasar yang memastikan bahwa organisasi, baik sektor publik maupun swasta, bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya keuangan mereka. Akuntabilitas mencakup penyediaan informasi yang transparan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif. Prinsip ini membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dana, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat kepercayaan publik. Sebagai salah satu elemen inti dalam tata kelola yang baik, akuntabilitas juga berfungsi untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung keberlanjutan organisasi.

1. Memastikan Keterbukaan dan Transparansi dalam Tata Kelola

Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan elemen penting yang mendasari akuntabilitas dalam organisasi. Transparansi memungkinkan organisasi untuk membuka informasi keuangan kepada pemangku kepentingan dengan cara yang jujur, jelas, dan dapat diakses. Menurut Gray, Owen, & Adams (1996), transparansi mencakup

pelaporan yang terbuka mengenai alokasi anggaran, pengeluaran, dan hasil keuangan. Transparansi ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau keputusan keuangan dan mengevaluasi kinerja organisasi, sehingga menciptakan kepercayaan dan keadilan dalam tata kelola organisasi.

Selain itu, transparansi memperkuat hubungan antara manajemen dan pemangku kepentingan dengan memberikan akses yang luas terhadap data dan informasi keuangan. Ketika organisasi menerapkan prinsip transparansi, mereka membuka pintu bagi evaluasi eksternal yang lebih objektif terhadap pengelolaan keuangan mereka (Hood & Heald, 2006). Transparansi juga berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, karena organisasi harus terbuka tentang keputusan keuangan yang diambil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sektor publik, transparansi membantu pemerintah menjaga legitimasi di mata masyarakat. OECD (1999) menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan publik menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau bagaimana dana publik digunakan dan apakah sesuai dengan kepentingan publik. Transparansi ini juga memungkinkan pemerintah untuk membuktikan bahwa mereka telah menggunakan anggaran dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab, serta untuk mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan keuangan.

Lebih lanjut, penerapan transparansi dalam organisasi tidak hanya membangun kepercayaan eksternal, tetapi juga memperkuat tata kelola internal. Ketika transparansi menjadi budaya organisasi, manajemen cenderung lebih disiplin dan hati-hati dalam mengambil keputusan terkait keuangan. Dengan keterbukaan terhadap audit dan pengawasan, manajemen mengembangkan sistem yang lebih akuntabel, yang mengarah pada keputusan yang lebih bijaksana dan berdampak positif pada kesehatan keuangan organisasi secara keseluruhan (COSO, 2013). Transparansi mendorong semua tingkatan organisasi untuk bertindak dengan tanggung jawab dan kehati-hatian yang lebih besar.

2. Mengurangi Risiko Penyalahgunaan Dana dan Korupsi

Akuntabilitas memainkan peran penting dalam mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan. Ketika sistem akuntabilitas yang kuat diterapkan, peluang untuk terjadinya penyimpangan keuangan dapat diminimalkan secara signifikan. Pengendalian internal yang efektif, termasuk audit internal yang rutin dan ketat, memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi risiko dan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan sebelum masalah menjadi lebih besar (OECD, 1999). Dengan adanya pengendalian yang ketat, organisasi dapat memastikan bahwa semua transaksi keuangan dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar dan dapat diaudit.

Audit eksternal oleh pihak ketiga juga merupakan elemen penting dalam mencegah penyalahgunaan dana. Auditor independen memberikan evaluasi yang obyektif dan tidak memihak terhadap kondisi keuangan organisasi, yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi potensi praktik korupsi atau penyimpangan yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen internal (COSO, 2013). Dengan audit eksternal, organisasi dapat memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan mereka telah diperiksa dan dinyatakan benar serta sesuai dengan standar yang berlaku.

Pengendalian internal dan eksternal yang ketat juga membantu menciptakan budaya etika dan integritas dalam organisasi. Gray, Owen, & Adams (1996) menekankan bahwa ketika organisasi menempatkan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam tata kelola keuangan, mereka mendorong perilaku yang lebih etis dan bertanggung jawab di kalangan karyawan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang menekankan pentingnya kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan, yang secara langsung meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana.

Selain itu, penerapan teknologi dalam sistem pengendalian keuangan juga membantu meningkatkan akuntabilitas. Teknologi memungkinkan pemantauan yang lebih efisien dan real-time terhadap aliran dana dan transaksi keuangan, sehingga lebih mudah untuk mendeteksi anomali atau tindakan yang mencurigakan (Hood & Heald,

2006). Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, organisasi dapat memperkuat pengawasan mereka terhadap keuangan dan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi penyalahgunaan dana pada tahap awal.

3. Mendukung Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Sumber Daya

Akuntabilitas tidak hanya berfungsi untuk menjaga transparansi, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola dengan efisien dan efektif. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan berarti bahwa organisasi mampu meminimalkan pemborosan dan menggunakan anggaran dengan cara yang memberikan nilai maksimal. Menurut Brigham & Houston (2021), akuntabilitas yang kuat memastikan bahwa anggaran disusun dengan cermat dan setiap pengeluaran dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil yang diharapkan. Dengan cara ini, organisasi dapat memaksimalkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas.

Efektivitas, di sisi lain, mengacu pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pengelolaan keuangan yang baik. COSO (2013) menekankan bahwa akuntabilitas membantu memastikan bahwa setiap pengeluaran mendukung pencapaian tujuan strategis dan operasional organisasi. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas, manajemen dapat melakukan evaluasi yang lebih tepat terhadap dampak dari setiap keputusan keuangan, serta memastikan bahwa anggaran digunakan untuk proyek yang benar-benar menghasilkan manfaat bagi organisasi.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak. Ketika organisasi mempertanggungjawabkan setiap aspek dari penggunaan anggaran, mereka cenderung lebih cermat dalam menyusun rencana keuangan dan menetapkan prioritas yang jelas. Ini berarti bahwa setiap pengeluaran dinilai berdasarkan efektivitas dan dampak jangka panjangnya (OECD, 1999). Sebagai hasilnya, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Selain itu, akuntabilitas mendorong organisasi untuk melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran dan hasilnya. Dengan memonitor kinerja keuangan secara berkala, organisasi dapat segera mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau penyesuaian, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap berada di jalur yang benar menuju pencapaian tujuan mereka (Brigham & Houston, 2021). Akuntabilitas yang kuat memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan organisasi.

4. Memperkuat Tata Kelola yang Baik

Tata kelola yang baik (*good governance*) tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, harus diimplementasikan secara konsisten untuk

memastikan bahwa organisasi berfungsi secara efektif dan bertanggung jawab. Menurut Gray, Owen, & Adams (1996), akuntabilitas memungkinkan organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan keuangan kepada pemangku kepentingan, yang menciptakan lingkungan di mana semua keputusan dapat dievaluasi secara obyektif.

Akuntabilitas memperkuat tata kelola dengan memastikan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi didasarkan pada informasi yang akurat dan transparan. OECD (1999) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab dalam organisasi. Dalam sektor publik, tata kelola yang baik memastikan bahwa pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat, sementara di sektor swasta, tata kelola yang baik menciptakan kepercayaan di antara investor dan pemegang saham.

Selain itu, akuntabilitas mendorong penerapan kontrol dan audit yang lebih ketat dalam proses keuangan organisasi. COSO (2013) menekankan bahwa pengendalian internal yang kuat adalah elemen penting dalam tata kelola yang baik karena memastikan bahwa semua aktivitas keuangan diawasi dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan menerapkan akuntabilitas, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam menjaga reputasi dan integritas organisasi. Ketika organisasi mempraktikkan tata kelola yang baik melalui akuntabilitas, mereka membangun citra sebagai entitas yang dapat dipercaya dan transparan (OECD, 1999). Ini tidak hanya membantu dalam menarik lebih banyak dukungan dari pemangku kepentingan tetapi juga meningkatkan daya saing organisasi dalam jangka panjang. Dengan memperkuat tata kelola melalui akuntabilitas, organisasi dapat terus berkembang dan menghadapi tantangan keuangan dengan lebih baik.

5. Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang dan Keberlanjutan

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan memainkan peran kunci dalam memastikan keberlanjutan dan kinerja jangka panjang organisasi. Ketika organisasi menerapkan akuntabilitas secara konsisten, mereka lebih mampu menjaga stabilitas keuangan dan mencegah potensi masalah keuangan di masa depan. Menurut Brigham & Houston (2021), akuntabilitas mendorong organisasi untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan strategis jangka panjang dan memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan. Ini membantu organisasi menjaga kinerja yang konsisten, terlepas dari tantangan ekonomi atau keuangan yang mungkin mereka hadapi.

Akuntabilitas juga berperan dalam memastikan bahwa organisasi tetap responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis atau

kebijakan pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas, organisasi dapat dengan cepat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. COSO (2013) menekankan bahwa akuntabilitas membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi sumber daya dan risiko keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang.

Selain itu, organisasi yang mempraktikkan akuntabilitas yang baik cenderung memiliki akses yang lebih baik ke sumber pendanaan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Ketika organisasi dianggap dapat dipercaya dan bertanggung jawab, mereka lebih mungkin menerima investasi, pendanaan, atau dukungan lainnya yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan mereka (OECD, 1999). Akuntabilitas juga membantu dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan, yang memberikan organisasi keuntungan kompetitif di pasar.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga memastikan bahwa organisasi tidak hanya mengejar tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan keuangan mereka. Ini mencakup upaya untuk menghindari pengambilan risiko yang tidak perlu yang dapat merusak stabilitas keuangan organisasi di masa depan. Dengan menjaga keseimbangan antara kinerja jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang, akuntabilitas

membantu organisasi dalam membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan (Brigham & Houston, 2021).

6. Peningkatan Keputusan Keuangan melalui Pelaporan yang Akurat

Pelaporan keuangan yang akurat merupakan dasar dari pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi yang akuntabel. Gray, Owen, & Adams (1996) menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan akurasi tinggi memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang benar dan dapat diandalkan. Pelaporan yang akurat ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan organisasi, yang membantu dalam mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Laporan keuangan yang akurat juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, karena mereka tahu bahwa informasi yang diberikan mencerminkan kenyataan.

Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan juga membantu manajemen dalam mengidentifikasi potensi masalah atau risiko keuangan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi krisis (COSO, 2013). Dengan memiliki data yang akurat dan up-to-date, organisasi dapat segera mengambil tindakan korektif untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih besar. Pelaporan yang akurat juga memungkinkan organisasi untuk memantau kinerja mereka secara berkelanjutan dan memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar menuju pencapaian tujuan strategis mereka.

Lebih jauh lagi, akurasi dalam pelaporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan transparansi di seluruh organisasi. Ketika laporan keuangan dibuat dengan benar dan diaudit oleh pihak eksternal, organisasi dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap akuntabilitas dan tata kelola yang baik (Hood & Heald, 2006). Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan tetapi juga menciptakan budaya kepercayaan yang mendukung keberlanjutan jangka panjang organisasi.

Akhirnya, pelaporan keuangan yang akurat membantu organisasi dalam mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Dengan mengikuti standar akuntansi yang diakui secara internasional, seperti IFRS, organisasi dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka sesuai dengan persyaratan hukum dan dapat diterima oleh otoritas pengawas serta pemangku kepentingan lainnya (COSO, 2013). Ini memberikan jaminan tambahan bahwa organisasi beroperasi dengan integritas dan bertanggung jawab atas setiap keputusan keuangan yang mereka buat.

2.2. Tinjauan Empiris

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di universitas menjadi fokus utama untuk menjaga kredibilitas, kepercayaan, dan kinerja institusi pendidikan tinggi. Sejumlah penelitian empiris telah mengeksplorasi tantangan dan keberhasilan universitas dalam menerapkan akuntabilitas keuangan. Studi-studi ini menyoroti masalah seperti kurangnya transparansi, kelemahan dalam

pengawasan keuangan, serta keterbatasan teknologi informasi yang menghambat pelaporan keuangan yang akurat.

1. Sutanto, A., & Rahman, S, (2019). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Universitas Negeri: Studi Kasus Universitas Indonesia

Penelitian ini menyoroti Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Universitas Negeri: Studi Kasus Universitas Indonesia dengan menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan pimpinan universitas, kepala bagian keuangan, dan auditor internal, sementara analisis dokumen melibatkan laporan keuangan dan hasil audit internal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Indonesia telah menerapkan audit internal sebagai mekanisme pengendalian keuangan, namun pelaporan keuangan masih sering terlambat dan kurang detail. Meskipun pengelolaan dana riset dan beasiswa dinilai cukup baik, ketidakpastian dalam laporan keuangan menyebabkan kesulitan dalam memantau kinerja keuangan secara menyeluruh. Sutanto dan Rahman (2019) merekomendasikan implementasi teknologi informasi yang lebih baik untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan keuangan.

2. Yuliana, N., & Wijaya, R. (2020) Pengaruh Sistem Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan di Universitas Gadjah Mada

Penelitian ini menyoroti tentang Pengaruh Sistem Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan di Universitas Gadjah Mada dengan menggunakan metode campuran, menggabungkan survei kuantitatif

terhadap 150 staf administrasi dan wawancara kualitatif dengan pimpinan universitas. Fokus penelitian adalah untuk mengevaluasi efektivitas sistem akuntabilitas dan sejauh mana sistem ini mendukung pengelolaan keuangan universitas.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Universitas Gadjah Mada memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi dan standar akuntansi, dengan audit internal berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Namun, Yuliana dan Wijaya (2020) juga menemukan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan eksternal, seperti mahasiswa dan masyarakat, masih minim. Pemangku kepentingan seringkali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi keuangan, yang menimbulkan persepsi kurang transparansi.

3. Ahmad, A. Z., & Abdullah, R. (2021). Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan di Institusi Pendidikan Tinggi: Studi Kasus Universitas Malaya

Penelitian ini menyoroti Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan di Institusi Pendidikan Tinggi: Studi Kasus Universitas Malaya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik pada data laporan keuangan tahunan Universitas Malaya selama lima tahun terakhir. Survei kuantitatif juga dilakukan terhadap 200 staf administrasi dan keuangan untuk mengukur efektivitas akuntabilitas keuangan.

Hasil menunjukkan bahwa Universitas Malaya memiliki sistem pengelolaan keuangan yang sangat akuntabel, dengan teknologi informasi memainkan peran penting dalam pelaporan yang akurat. Ahmad dan

Abdullah (2021) menemukan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan eksternal berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap universitas. Namun, regulasi pemerintah yang terkadang membatasi fleksibilitas universitas dalam mengelola dana menjadi tantangan yang perlu diatasi.

2.3.Kerangka Penelitian

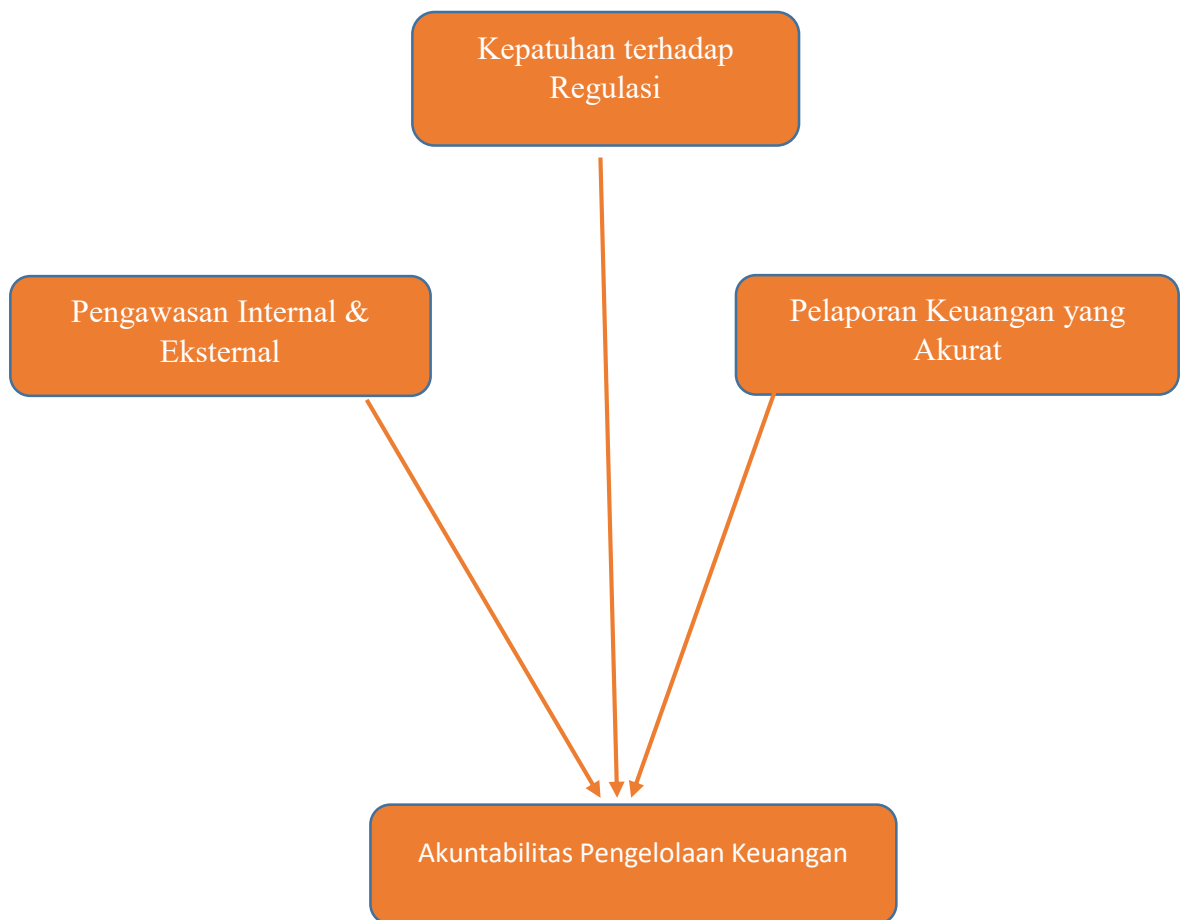
Berbagai penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan di institusi pendidikan tinggi telah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan pada tinjauan empiris. Penelitian-penelitian tersebut mendukung pentingnya penerapan teori akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik di institusi pendidikan tinggi, seperti yang dianalisis dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian yang dilakukan ini, mengutip beberapa pendapat para ahli yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam.

Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan di Universitas Hasanudin merujuk pada teori Gray, Owen, & Adams (1996); OECD (1999); COSO (2013) yaitu Transparansi, Kepatuhan terhadap Regulasi, Pengawasan Internal & Eksternal, Efisiensi Penggunaan Anggaran, dan Pelaporan Keuangan yang Akurat. Akan tetapi dalam penelitian ini membatasi indikator tersebut. Adapun indikator dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan aktivitas keuangan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Pengawasan Internal & Eksternal: Mekanisme pengawasan untuk menjamin pengelolaan yang baik.
3. Pelaporan Keuangan yang Akurat: Penyampaian laporan keuangan yang jelas dan tepat waktu.

Kerangka Konseptual



Sumber: Gray, Owen, & Adams (1996); OECD (1999); COSO (2013)

Gambar 1. Kerangka Konseptual